

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hari Wibowo, Kajian Atas Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Kasus Class Action Di Kota Surakarta( Studi Kasus Perkara Nomor : 59 / Pdt.G / 2009 / Pn. Ska ), 2012, Skripsi, Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret
- Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda (Ed.), NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih, Jakarta, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006,
- Amiruddin, Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Genta Press, Yogyakarta, 2012,
- Anisah, Siti, dan Trisno Raharjo, Batasan Melawan Hukum Dalam Perdata Dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volumen 25 Nomor 1, 2018, H.Dwidja Priyanto, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi, Prenada Media, 2017, hal.
- Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat hukum. UGM Press, 2018,
- Ardison Asri, Tindak Pidana Khusus, Sukabumi, CV Jejak, 2002,
- Badriyah Harun dan Aryya Wyagrhatama, Tata Cara Pengajuan Class Ation (Gugatan Kelompok masyarakat) Pustaka yustisia, 2009,
- Bambang Djoyo Supeno, SH, Mhum, Diklat Viktimologi, Semarang, 1997,
- Badan Pemeriksa Keuangan, Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah 2018 Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan,), Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, 2001, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung,
- Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, 1998 Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Volume 1 Nomor 1,
- Baswir, Revrison. Dinamika korupsi di Indonesia: dalam perspektif struktural. Jurnal Universitas Paramadina, Volume 2 Nomor 1, 2002. Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Alumni, 1982,

- Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, 2014,
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, dan Hardianto Djanggih, Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, Volume 15 Nomor 1, 2019,
- CNN Indonesia, ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat, CNN Indonesia, 17 November, 2019, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses tanggal 6 Desember 2020.
- Devina Halim, Survey LSI: Persepsi Publik Terhadap Efektifitas Kinerja KPK Menurun. Kompas, 6 Desember, 2020, [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), diakses tanggal 5 Desember 2020
- Erna Widjajati, Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Indonesia, 2011, Jurnal Hukum No. 1 Volume 18,
- Eva Novianty, Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011,
- Fathur Rahman, Korupsi Di Tingkat Desa, Governance, Volume 2 Nomor 1, November 2011, R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Fitrizal Blessi Karina, Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Crimen, Volume VI Nomor 9, November 2017, Choirul Huda, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018,
- Gunawan, T.J. Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi. 2018. Jakarta: Kencana,
- Hari Purwadi, Gugatan Kelompok (Class action) dalam Tata Hukum Indonesia, 2003, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro,
- I Ketut Tjukup, et.al, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), Jhaper, 2017,

- I Nyoman Nurjaya, Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) dalam Teori dan Praktek Peradilan, 2006, Jurnal Risalah Hukum Volumen 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman,
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukumm Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020,
- J.E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. 1987. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020, Kompak, Jakarta, 2020,
- Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung Alumni, 2002,
- Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, 2007, Penerbit PT Djembatan, Jakarta, ,
- Leden Marpaung,. Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi. 1997. Jakarta: Rajawali Pers,
- M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, 1979, Jakarta, Pradnya Paramita Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
- Mas Achmad Santosa, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), 1997.Jakarta, ICEL Mawardi, Mawardi. Sistem Hukum Islam Dan Anglo Saxon: Kajian Perbandingan Pemikiran Al-Thufi dan Roscoe Pound. Millah: Jurnal Studi Agama, Volume 2 Nomor 2 2016,
- Muhammad Azhar (Et.al), Pendidikan Antikorupsi, Yogyakarta, LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003.
- Muhamad Yusuf, Slamet Sampurni, Muhammad Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra, Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara, 2018, Jurnal Yustika Volume 21 Nomor 2,
- Munir Fuady. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, 2014, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

- Mustaghfirin dan Irwanto Efendi, Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007,
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2004, Jakarta Sinar Grafika,
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, 2003, Bandung, Rajawali Pers,
- Nadeak, Irwadana Juliandri, Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 5 Nomor 2, 2008,
- Nana Rukmana, *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1993,
- Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020, KOMPAK Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia
- Rangkuti, Afifa, Konsep keadilan dalam perspektif Islam, *Tazkiya*, Volume 6 Nomor 1, 2017, hal. 20
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. 2010. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. 1995. Bandung: Mandar Maju.
- Ribut Baidi, Peluang Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.2, 2019.
- Saifulloh, Putra Perdana. Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 47, Nomor 4, 2017,
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* 2014, Jakarta, Sinar Grafika,
- Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven and London, Yale University Press, 1968,

- Sanusi dan Suci Hati Handayani, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Hukum Responsif, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Vol.8 No.2, 2017,
- Simarmata, Markus H, Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Volume 3 Nomor 2, 2017,
- Sri Mamudji, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 34 Nomor 3, 2017,
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- Sudargo Gautama,1995 Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni.Sudiro, Agus, Mohammad Gamal Rindarjono, dan Sigit Santosa, Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Bagi Rumah Tangga Sasaran Di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Tahun 2013, GeoEco, Volume 1 Nomor 2, 2015,
- Sudarmanto, Eko, Dian Cita Sari, Nurmiati Nurmiati, Siti Saodah Susanti, Syafrizal Syafrizal, Devi Yendrianof, Sardjana Orba Manullang et al. Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Syahroni, Maharso, and Tomy Sujarwadi. Korupsi, bukan budaya tetapi penyakit. Deepublish, 2018.
- Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia ,Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Sastroputro, Santoso, 1986, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Alumni,
- Syamsul Anwar (Et.al), Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta, Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006,
- Thomas, 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Ejournal Pemerintahan Integratif, Volume 1 Nomor 1, hal 51-64.
- Ummy Athiq, Policy of Temporary Direct Aid Program Analyzed From Welfare State Concept, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 2 Nomor 2, 2014,

- Wati, Darmi. Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010), Jurnal Hukum Das Sollen, Volume 2 Nomor 1, 2018, hal. 21
- Weilert, A. K. (2016). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)—After Ten Years Of Being In Force. Max Planck Yearbook Of United Nations Law Online, Volume 19 Nomor 1, hal. 216-240.
- W.J.S. Poewadarminta. Kamus Besar Umum Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka. 1986
- Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti. "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6.3, 2018,